

**Pidato Duta Besar Belanda Dr. Nikolaos van Dam**  
**Dialog dengan Organisasi dan Partai Politik Islam di Muhammadiyah,**  
**Jakarta, 7 April 2008**

Assalamu 'alaykum wa rahmat Allah wa barakatuh  
Salam sejahtera bagi kita semua  
Yang terhormat Profesor Din Syamsuddin,  
Yang terhormat Dr. Hedayat Nur Wahid,  
Yang terhormat para duta besar negara sahabat,  
Yang terhormat para tokoh agama Islam,  
Yang terhormat para perwakilan partai politik Islam,  
Yang terhormat para perwakilan organisasi agama lainnya,  
Serta hadirin dan hadirat sekalian,

Tidak luput dari perhatian kita bahwa film anti-Islam berjudul *Fitna* buatan anggota parlemen Belanda dari partai oposisi kecil, Geert Wilders, yang telah lama diantisipasi akhirnya ditayangkan juga setelah berbagai perdebatan dan kontroversi. Penayangan ini menimbulkan reaksi dan perdebatan yang begitu luas, termasuk di Indonesia.

Pendekatan Wilders tentang Islam dan Al Quran, seperti yang disampaikannya lewat film ini, telah menyinggung perasaan banyak orang, khususnya umat Islam. Film ini mengidentikkan Islam dengan kekerasan. Perkenalkan saya untuk memulai dengan menegaskan bahwa pandangan ini tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan pemerintah Belanda dalam hal apapun juga. Pemerintah Belanda dengan tegas menolak film ini karena sifatnya yang menggeneralisasikan dengan cara yang menyakitkan serta dampak menyinggung dan pemecahbelahannya. Kita sebenarnya berada pada pihak yang sama dalam menyikapi film ini. Islam tidak boleh diidentikkan dengan tindakan kekejaman dan kekerasan. Kami menyesal bahwa Wilders telah meluncurkan film ini. Kami percaya bahwa tidak ada manfaat dari film ini kecuali untuk menyinggung perasaan. Namun perasaan tersinggung tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan menyerang dan tindakan mengancam. Pemerintah Belanda merasa terdukung dengan reaksi awal yang begitu terkendali baik dari organisasi Islam di Belanda maupun mayoritas organisasi di Indonesia.

Jelas bahwa pemerintah Belanda tidak sendiri dalam menolak film ini. Mayoritas penduduk Belanda juga menolak film ini, demikian pula mayoritas media Belanda. Oleh karena itu, Geert Wilders hanya bisa memutar filmnya lewat penyedia layanan internet di luar Belanda.

Para pemimpin di seluruh dunia, termasuk Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, dan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa, menolak film ini. Mayoritas besar anggota parlemen Belanda juga menolak dan memberi kritik terhadap film ini, kecuali partai oposisi kecil Geert Wilders sendiri. Selasa lalu, debat panjang diadakan di parlemen Belanda tentang film ini. Semua partai politik dan pemerintah Belanda menolak film ini dan juga menolak sikap memecah belah serta pandangan sepihak Wilders tentang Islam.

Pendekatan yang dilakukan dalam film *Fitna* ini bertentangan dengan segala sesuatu yang pemerintah Belanda ingin raih dan dambakan dalam masyarakatnya, yaitu menciptakan sebuah masyarakat dimana rakyatnya dapat hidup berdampingan secara rukun. Islam jelas mempunyai posisi nyata dalam masyarakat Belanda. Dari jumlah total 17 juta penduduk, di Belanda terhitung lebih dari 800.000 penduduk, sekitar 5,3% dari jumlah penduduk Belanda, yang mempunyai akar di negara-negara Islam. Lembaga, organisasi, media dan sekolah Islam

menjadi unsur yang tidak asing lagi di negara kami. Di atas tanah Belanda kini telah dibangun lebih dari 450 mesjid. Selain itu, juga terdapat Universitas Islam. Perkembangan ini merupakan cerminan dari tradisi toleransi beragama yang mapan di Belanda. Umat Islam memberikan kontribusi besar bagi dialog dalam masyarakat Belanda, terutama karena keikutsertaan mereka dalam badan-badan konsultatif. Dua anggota pemerintah Belanda mempunyai akar di negara-negara Islam, yaitu Ahmed Aboutaleb, Sekretaris Negara untuk Urusan Sosial dan Tenaga Kerja, dan Nebahat Albayrak, Sekretaris Negara untuk Kehakiman. Saya menyebutkan fakta-fakta ini untuk menunjukkan bahwa pada umumnya umat Islam di Belanda dapat bekerja sama dengan baik dan hidup rukun dengan warga non-Muslim.

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang universal, sebuah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Belanda. Sudah barang tentu umat Islam di Belanda bebas menganut agamanya. Undang-undang Belanda juga melindungi kebebasan berpendapat. Ini berarti bahwa semua penduduk Belanda dapat mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka tanpa izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Di Belanda tidak ada sensor. Itu sebabnya mengapa pemerintah Belanda tidak dapat mengeluarkan larangan atas film itu sebelumnya. Jadi, kita tidak dapat melarang sesuatu yang isinya belum diketahui. Bagi mereka yang mempunyai kritik terhadap doktrin-doktrin agama tertentu, mereka mempunyai hak untuk mengungkapkannya. Hanya pengadilan saja yang dapat menentukan apakah adanya pelanggaran hukum setelah pendapat diungkapkan. Namun demikian, kita tidak boleh menafsirkan kebebasan berpendapat sebagai suatu kebebasan untuk menyinggung perasaan orang lain dengan sengaja. Semua orang mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak dan nama baik orang lain. Pemerintah Belanda berulang kali meminta perhatian Geert Wilders terhadap kemungkinan dampak dari filmnya dan menuntut tanggung jawabnya. Pemerintah Belanda sangat menyesal bahwa Wilders tetap memutuskan untuk meluncurkan film ini. Film ini tidak mempunyai tujuan apapun juga kecuali untuk menginjak-injak perasaan orang.

Tidak seorang pun menginginkan perpecahan lebih lanjut. Prioritas utama kita adalah untuk meyakinkan bahwa ada cukup ruang untuk melakukan dialog atas dasar saling menghormati dan asas peraturan hukum. Pemerintah Belanda akan terus melakukan dialog yang dewasa dan terbuka serta menjalin kerja sama dengan masyarakat di Belanda dan masyarakat internasional. Saya yakin bahwa kita tidak akan membiarkan film ini mengalihkan kita dari tanggung jawab bersama ini. Marilah kita pelihara kehangatan hubungan kita ini dengan kepala dingin. Seperti yang telah saya sampaikan, kita mempunyai pendapat yang sama tentang film ini dan cara bagaimana kita saling menghormati. Kita harus menolak keras film ini.

Sehubungan dengan itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, atas pernyataan beliau tentang film ini serta himbauan beliau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi hukum dan bertindak dalam batasan hukum yang berlaku.

Pemerintah Belanda menolak pendekatan anti-Islam dari film ini dan menyatakan terbuka untuk dialog serta menghimbau untuk kebebasan berpendapat dan sikap saling menghormati. Belanda ingin tetap menjalin kontak terbuka dengan semua pihak yang menginginkan dialog damai. Hanya dengan cara ini, kita bisa sukses bekerja sama dalam menciptakan sebuah masyarakat yang lebih kuat berpijak pada saling pengertian dan saling menghormati, yang merupakan unsur-unsur yang sangat berharga dalam kehidupan kita saat ini.

Wassalamu 'alaykum wa rahmat Allah wa barakatuh